

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Aceh Barat (Studi Kasus di Kecamatan Johan Pahlawan)

Zahra Mulia

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teuku Umar

*Email Korespondensi: zahramulia24@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 06-09-2026
Disetujui 11-09-2026
Diterbitkan 13-09-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of supervision and village official competence on the effectiveness of village fund management in Johan Pahlawan District, West Aceh Regency. Effective village fund management is crucial for achieving village governance that is transparent, accountable, and compliant with applicable regulations. This study employs a quantitative approach using an associative method. Primary data were obtained through questionnaires distributed to 63 respondents—comprising village heads, village secretaries, and village treasurers—across 21 villages in Johan Pahlawan District. Data analysis was conducted using Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4 software. The results indicate that supervision does not influence the effectiveness of village fund management, whereas village official competence does have an impact. This suggests that higher competence among village officials leads to more effective village fund management, while the intensity of supervision currently implemented has not significantly contributed to enhancing management effectiveness. This study is expected to serve as a basis for evaluation by village governments to improve the quality of village fund management in the future.

Keywords: Supervision, Village Apparatus Competence, Effectiveness, Village Fund Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan dan kompetensi aparatur desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Pengelolaan dana desa yang efektif menjadi hal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 63 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa di 21 desa Kecamatan Johan Pahlawan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan tidak berpengaruh terhadap efektivitas dana desa dan kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur desa, maka semakin efektif pengelolaan dana desa yang dilaksanakan, sementara intensitas pengawasan yang dilakukan belum cukup memberikan pengaruh yang berarti terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah

desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa di masa yang akan datang.

Kata kunci: Pengawasan, kompetensi aparatur desa, efektivitas dana desa

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Mulia, Z. (2026). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Aceh Barat (Studi Kasus di Kecamatan Johan Pahlawan). Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(5), 10516-10526. <https://doi.org/10.63822/4ce2tp07>

PENDAHULUAN

Perkembangan otonomi daerah yang pesat telah mengubah pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk desa sebagai unit pemerintahan terkecil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan untuk mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokalnya. Guna mendukung kewenangan tersebut, pemerintah pusat meluncurkan program Dana Desa sejak tahun 2015 sebagai bagian dari dana transfer ke daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.

Alokasi anggaran Dana Desa secara nasional menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari Rp60 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp72 triliun pada tahun 2023, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Besarnya alokasi ini menuntut pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa secara efektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan oleh regulasi yang berlaku. Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu daerah penerima alokasi Dana Desa dalam jumlah besar, dengan realisasi mencapai Rp250.632.328.000 pada tahun 2021 yang didistribusikan ke 12 kecamatan.

Namun demikian, praktik pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Barat masih diwarnai berbagai persoalan. Hasil audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat terhadap penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2021 menemukan indikasi penyimpangan keuangan desa senilai sekitar Rp6,8 miliar, di mana sebagian besar temuan tersebut belum ditindaklanjuti hingga awal tahun 2022. Persoalan serupa berlanjut hingga tahun 2026, dengan temuan indikasi penyelewengan yang meningkat menjadi sekitar Rp10,7 miliar serta masih banyaknya rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) periode 2022–2025 yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah gampong. Kondisi ini bahkan mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengambil langkah tegas berupa pemberhentian sementara terhadap tujuh keuchik pada April 2026 akibat ketidakpatuhan terhadap rekomendasi hasil audit. Permasalahan pengelolaan Dana Desa tersebut tersebar di beberapa kecamatan, termasuk Kecamatan Johan Pahlawan, Woyla, Woyla Timur, Samatiga, dan Pante Ceureumen, yang mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa di wilayah ini masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa penyalahgunaan Dana Desa umumnya bersumber dari lemahnya perencanaan manajemen, minimnya transparansi, serta rendahnya pengetahuan aparatur desa dalam mengelola administrasi dan keuangan. Dua faktor yang secara teoretis maupun empiris diyakini berperan penting dalam menentukan efektivitas pengelolaan Dana Desa adalah pengawasan dan kompetensi aparatur desa. Pengawasan berfungsi sebagai instrumen manajemen untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, kompetensi aparatur desa yang tercermin dari kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengelola administrasi dan keuangan desa menjadi penentu profesionalisme pelaksanaan tugas dan minimalisasi risiko penyimpangan anggaran.

Meskipun kedua faktor tersebut secara konseptual relevan, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengawasan dan kompetensi aparatur desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa masih menunjukkan inkonsistensi. Sebagian penelitian menemukan bahwa kompetensi aparatur desa dan pengawasan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa, sementara penelitian lain menemukan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan. Demikian pula, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan

Dana Desa apabila pelaksanaannya belum berjalan optimal atau belum didukung koordinasi yang efektif antara aparatur desa, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada konteks wilayah yang belum banyak diteliti seperti Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan fenomena permasalahan pengelolaan Dana Desa yang masih berlangsung di Kabupaten Aceh Barat serta inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh pengawasan dan kompetensi aparatur desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Johan Pahlawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif, melibatkan 63 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa di 21 desa, serta dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur akuntansi sektor publik, sekaligus kontribusi praktis bagi pemerintah desa di Kecamatan Johan Pahlawan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan Dana Desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif untuk menguji pengaruh kausal antarvariabel melalui pengujian hipotesis secara statistik. Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang mencakup 21 desa. Populasi penelitian adalah seluruh aparatur desa di wilayah tersebut, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel, yaitu sebanyak 63 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa di 21 desa. Pengawasan dalam penelitian ini diukur dari persepsi aparatur desa selaku pihak yang menerima dan merasakan langsung pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bukan dari sudut pandang BPD sebagai pelaksana pengawasan.

Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden, dengan instrumen yang diadaptasi dari penelitian terdahulu. Kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya dikeluarkan dari analisis. Setiap item pernyataan diukur menggunakan skala Likert 1–5 (Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju). Penelitian ini melibatkan tiga variabel: pengawasan (X1) dan kompetensi aparatur desa (X2) sebagai variabel independen, serta efektivitas pengelolaan dana desa (Y) sebagai variabel dependen. Variabel pengawasan diukur melalui delapan indikator teknik pengawasan (pemantauan, pemeriksaan, penilaian, wawancara, pengamatan, perhitungan, analisis, dan pelaporan); variabel kompetensi aparatur desa diukur melalui lima indikator (pemahaman, keahlian teknis, pelatihan, inisiatif kerja, dan kode etik kepegawaian); sedangkan variabel efektivitas pengelolaan dana desa diukur melalui delapan indikator ketepatan (waktu, biaya, pengukuran, pilihan, cara berpikir, pelaksanaan perintah, penentuan tujuan, dan sasaran).

Data dianalisis menggunakan metode Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4.1.1.8, yang dipilih karena tidak mensyaratkan jumlah sampel besar maupun asumsi normalitas data. Evaluasi model pengukuran (outer model) dilakukan melalui uji validitas konvergen (nilai loading factor > 0,7 dan Average Variance Extracted > 0,5), uji validitas diskriminan (nilai Heterotrait-Monotrait Ratio/HTMT), serta uji reliabilitas menggunakan Cronbach's

Alpha dan Composite Reliability (keduanya disyaratkan $> 0,7$). Evaluasi model struktural (inner model) dilakukan melalui uji koefisien determinasi (R-Square), effect size (f^2), model fit dengan indikator Standardized Root Mean Square Residual (SRMR $< 0,08$), serta uji hipotesis melalui prosedur bootstrapping dengan 5.000 subsampel two-tailed. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai p-value $< 0,05$ dengan tingkat kepercayaan 95% (t-tabel = 1,96).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 63 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa yang tersebar merata di 21 desa Kecamatan Johan Pahlawan (masing-masing jabatan 33,3%). Mayoritas responden berada pada rentang usia 35–45 tahun (47,6%), yang mengindikasikan tingkat kematangan dan pengalaman kerja yang memadai dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Dari sisi pendidikan, sebagian besar responden (65,1%) berlatar belakang S1/S2, sementara sisanya (34,9%) berpendidikan SMA.

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Validitas diskriminan dievaluasi melalui nilai cross loading pada Tabel 1, yang menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki korelasi tertinggi terhadap variabel asalnya dibandingkan variabel lain, mengonfirmasi bahwa ketiga konstruk terukur secara berbeda satu sama lain.

Tabel. 1 Cross Loading

Indikator	Efektivitas Dana Desa	Kompetensi Aparatur Desa	Pengawasan
EV2	0.840	0.609	0.511
EV4	0.745	0.580	0.413
EV5	0.806	0.630	0.495
EV6	0.712	0.506	0.448
EV7	0.722	0.613	0.523
EV8	0.777	0.629	0.459
EV9	0.803	0.573	0.550
EV10	0.740	0.533	0.409
EV12	0.794	0.593	0.456
EV13	0.813	0.633	0.544
EV14	0.759	0.650	0.570
EV16	0.745	0.594	0.587
KAD2	0.590	0.743	0.627
KAD3	0.532	0.753	0.527
KAD6	0.542	0.756	0.539
KAD7	0.676	0.806	0.675
KAD8	0.579	0.750	0.501
KAD9	0.630	0.785	0.609

KAD10	0.621	0.817	0.513
PS3	0.359	0.503	0.708
PS4	0.390	0.502	0.775
PS5	0.523	0.599	0.779
PS7	0.473	0.558	0.839
PS8	0.459	0.524	0.742
PS9	0.563	0.647	0.841
PS10	0.589	0.623	0.849
PS11	0.410	0.396	0.729
PS12	0.446	0.482	0.753
PS13	0.608	0.699	0.795
PS15	0.607	0.703	0.772

Sumber: Output SmartPLS 4.1.1.8

Hasil uji reliabilitas melalui Cronbach's Alpha, Composite Reliability, dan Average Variance Extracted (AVE) ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Average Variance Extracted, Composite Reliability, dan Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's alpha	Composite Reliability (rho_a)	Composite Reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Efektivitas	0.938	0.939	0.946	0.596
Kompetensi	0.888	0.891	0.912	0.598
Pengawasan	0.936	0.944	0.945	0.611

Sumber: Output SmartPLS 4.1.1.8

Seluruh variabel menunjukkan nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha di atas 0,7 serta nilai AVE di atas 0,5, sehingga instrumen penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Tabel 8 menyajikan hasil uji koefisien determinasi (R-Square) dan effect size (f^2).

Tabel 3. Nilai R-Square dan f^2

Variabel	R-square	Adjusted R-square	f^2
Efektivitas	0.611	0.598	
Pengawasan			0.031
Kompetensi			0.495

Sumber: Output SmartPLS 4.1.1.8

Nilai R-Square sebesar 0,611 menunjukkan bahwa 61,1% variasi pada variabel efektivitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel pengawasan dan kompetensi aparatur desa secara bersama-sama, sedangkan sisanya sebesar 38,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai Adjusted R-Square sebesar 0,598 tergolong model yang kuat ($\geq 0,50$). Berdasarkan nilai f^2 , variabel pengawasan memperoleh nilai 0,031 yang tergolong pengaruh kecil (small effect), sedangkan variabel kompetensi aparatur desa memperoleh nilai 0,495 yang tergolong pengaruh besar (large effect) menurut panduan Cohen (1988).

Tabel 4. Model Fit

	Saturated model	Estimated model
SRMR	0.079	0.079

Sumber: Output SmartPLS 4.1.1.8

Nilai SRMR sebesar 0,079 ($\leq 0,08$) menunjukkan bahwa model dan data penelitian ini memiliki kecocokan (fit) yang baik.

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis melalui bootstrapping dengan 5.000 subsampel ditampilkan pada Tabel 5

Tabel 5. Path Coefficient

Jalur	Originl Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistik (O/STDEV)	P value)
Pengawasan -> Efektivitas	0.164	0.173	0.124	1.325	0.185
Kompetensi -> Efektivitas	0.652	0.655	0.099	6.573	0.000

. Sumber: Output SmartPLS 4.1.1.8

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa: (1) variabel pengawasan memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,164 dengan T-statistik $1,325 < 1,96$ dan P sebesar $0,185 > 0,05$, sehingga H1 ditolak, yang berarti pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa; (2) variabel kompetensi aparatur desa memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,652 dengan T-statistik $6,573 > 1,96$ dan P sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H2 diterima, yang berarti kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan, yang dalam konteks ini diukur dari fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Johan Pahlawan. Meskipun arah pengaruhnya positif, secara statistik pengaruh tersebut belum cukup kuat. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan yang berjalan masih bersifat formalitas dan prosedural, belum menyentuh aspek substantif pengelolaan keuangan desa, serta belum didukung partisipasi aktif masyarakat. Dalam perspektif Teori Stewardship, kondisi ini

menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa lebih ditentukan oleh kesadaran dan tanggung jawab internal aparatur desa selaku steward dibandingkan mekanisme pengawasan eksternal semata. Hasil ini konsisten dengan temuan Sugiharti dan Hariani (2021) yang menemukan bahwa pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa akibat lemahnya koordinasi antara aparatur desa, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan yang lebih substantif dan didukung sistem pelaporan yang transparan agar fungsi kontrol BPD dapat berkontribusi nyata terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan, dengan tingkat pengaruh yang tergolong besar. Semakin tinggi kompetensi aparatur desa—baik dari sisi pengetahuan, keterampilan teknis, maupun kemampuan manajerial—semakin efektif pula pengelolaan dana desa yang dilaksanakan. Dalam perspektif Teori Stewardship, aparatur desa yang kompeten mampu menjalankan amanah secara profesional, mengelola sumber daya secara efisien, dan meminimalkan penyimpangan, sehingga memperkuat perannya sebagai steward yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Julistioningsih dan Widajantie (2022) serta Laoli et al. (2024) yang menegaskan bahwa aparatur yang terampil dan berpengetahuan memadai mampu meminimalkan kesalahan prosedural dan lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan desa. Kompetensi aparatur desa juga berperan sebagai mekanisme untuk meminimalkan asimetri informasi dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga pemahaman yang baik terhadap tata kelola dana desa akan menekan potensi penyelewengan anggaran.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan dan kompetensi aparatur desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan hasil analisis menggunakan PLS-SEM, dapat disimpulkan bahwa pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Kondisi ini disebabkan oleh pelaksanaan pengawasan yang masih bersifat formalitas dan administratif, belum menyentuh aspek substantif pengelolaan keuangan desa, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa di lapangan. Sebaliknya, kompetensi aparatur desa terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, dengan tingkat pengaruh yang tergolong besar. Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur desa—baik dari sisi pengetahuan, keterampilan teknis, maupun kemampuan manajerial—semakin efektif pula pengelolaan dana desa yang dilaksanakan. Secara keseluruhan, model penelitian ini mampu menjelaskan 61,1% variasi efektivitas pengelolaan dana desa melalui variabel pengawasan dan kompetensi aparatur desa, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam interpretasi hasil, terutama terkait pengukuran variabel pengawasan yang didasarkan pada persepsi pihak yang diawasi (kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa), bukan dari perspektif BPD selaku pelaksana fungsi pengawasan, akibat keterbatasan akses dan waktu penelitian yang tidak memungkinkan peneliti menjangkau seluruh anggota BPD dari 21 desa sebagai responden tambahan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan bagi berbagai pihak terkait. Pertama, bagi pemerintah desa, disarankan untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal dalam pengelolaan dana desa agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mampu meminimalkan potensi penyimpangan.

Kedua, bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), disarankan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa secara lebih substansial, tidak sekadar bersifat administratif. BPD perlu mengikuti pelatihan teknis tata kelola keuangan desa secara berkala agar mampu melakukan verifikasi lapangan dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Selain itu, BPD diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban—serta memperkuat koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat agar pengawasan berlapis dapat berjalan secara sinergis dan efektif dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga turut memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal, agar hasil penelitian menjadi lebih luas dan mendalam. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk melibatkan perspektif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung dalam pengukuran variabel pengawasan, memperluas cakupan wilayah penelitian, serta menggunakan metode penelitian yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, Y., & Usman, F. (2023). Pengaruh peran pengawasan atas akuntabilitas keuangan dan pengawasan atas kualitas pengendalian intern terhadap tata kelola pemerintah daerah. *Jurnalku*, 3(4), 408–425. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.600>
- Aulia, P. (2018). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten 50 kota (Studi empiris pada Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Kapur IX). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1–15.
- Firmansyah, H., & Sinatria, N. (2025). Peran inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Akuntansi Aisyah*, 6(1), 412–430.
- Islamiyah, F. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di kecamatan wajak (Studi empiris pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu dan Desa Patokpici). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*.
- Julistioningsih, A., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur desa dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(Edition Khusus 6), 2126–2134.
- Laoli, B. P., Hulu, F., Zebua, E., & Waruwu, M. H. (2024). Pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Hilimbowo Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota

- Gunungsitoli. *Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis dan Manajemen*, 6(1), 95–107. <https://doi.org/10.52005/bisnisan.v6i1.211>
- Liana, S. A., & Nugroho, W. S. (2022). Pengaruh transparansi, kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Studi empiris pada desa di Kecamatan Kaliangkrik). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 633–647.
- Nurdiati, Y. (2019). Pengaruh pelaksanaan fungsi pengawasan oleh badan permusyawaratan desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(3). <https://doi.org/10.25157/dinamika.v6i3.2815>
- Nurkhasanah, I. (2019). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan, dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi empiris pada desa se-kecamatan pringsurat)* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang].
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. (2021). Pengaruh kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, 1(2), 183–198.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Putri, H. (2025). Efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Betao Riase. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1607>
- Rahmah, L., & Nor, W. (2025). Building community trust: The effect of accountability, transparency, and community participation in village fund management. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(6), 2087–2102. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4169>
- Rahmawati, R., Heriana, T., Diana Sari, M., Dewi, S., & Almas, N. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa: Kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1533–1542. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12881>
- Rahayu, R., Anwar, F., Kasman, & Darmi, T. (2023). Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*, 5(1). <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v5i1.4963>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Simamora, B. (2022). Skala Likert, bias penggunaan dan jalan keluarnya. *Jurnal Manajemen*, 12(1). <https://doi.org/10.46806/jman.v12i1.978>
- Stefanni, C., & Damanik, F. A. (2026). Pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian iPhone dengan gaya hidup sebagai variabel moderasi pada generasi Z. *Jurnal Minfo Polgan*, 15(1), 289–301. <https://doi.org/10.33395/jmp.v15i1.15935>

-
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 6(1), 11–18.
<https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- Syahroni, M. I. (2022). Prosedur penelitian kuantitatif. *eJurnal Al Musthafa*, 2(3), 43–56.
<https://doi.org/10.62552/ejam.v2i3.50>
- Tanete, A. S. (2024). Village fund management: Accountability, transparency, community participation. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 4(1), 50–63.
<https://doi.org/10.36232/fair.v4i1.1353>
- Triutami, Y., & Widarno, B. (2024). Pengaruh good corporate governance (GCG), partisipasi masyarakat, kompetensi aparat dan pengawasan aparat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 310–317.